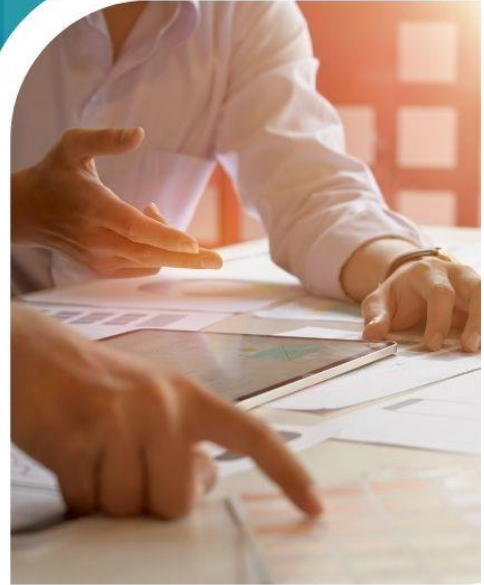


RENCANA AKSI

TAHUN 2024



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BERAU**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Aksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024. Rencana Aksi ini merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah sebagai pedoman dan pengendali pembangunan daerah atau sebagai arah dalam pencapaian tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan Rencana Aksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Berau secara berkesinambungan guna mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Berau yang Kompeten, berdaya saing, Profesional dan Berintegritas tinggi.

Demikian penyusunan Rencana Aksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024.

Tanjung Redeb, Februari 2024

**Kepala
Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Berau**

Hj. SRI EKA TAKARIYATI, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651212 199403 2 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Organisasi dan Struktur Organisasi	4
BAB II RENCANA AKSI	7
A. Rencana Strategis	7
B. Indikator Kinerja Utama	8
C. Perjanjian Kinerja	9
D. Rencana Aksi	11
BAB III PENUTUP	15
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2023
Tabel II.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2021-2026
Tabel II.2	Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2021-2026
Tabel II.3	Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau tahun 2024
Tabel II.4	Target Rencana Aksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024
Tabel I.5	Alokasi Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi salah satu langkah pemerintah untuk mewujudkan *good governance* dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur dan menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan pada Peraturan Bupati Berau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Berau.

Rencana Aksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau merupakan salah satu dokumen acuan dalam perencanaan dan penyelenggaraan organisasi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing penanggung jawab kegiatan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau, disusun secara bertahap menurut kegiatan, *output* dan indikator kinerja yang sudah diprogramkan dalam periode 1 (satu) tahun dan dievaluasi pelaksanaannya setiap triwulan, untuk menjamin tercapainya

pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

B. Dasar Hukum

Dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024, sebagai acuan dalam penyusunan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perda 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 017 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Berau ;
11. Rencana Strategis (Renstra) BKPP Kabupaten Berau Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Berau Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Aksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024 adalah:

- a. Salah satu dokumen acuan dalam perencanaan dan penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dalam mewujudkan optimalisasi kinerja aparatur yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- b. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran.

c. Terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara sekretariat dan Bidang-Bidang yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau.

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024 adalah:

- a. Penjabaran program kerja dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam periode 1 (satu) tahun.
- b. Untuk merencanakan pencapaian target kinerja Tahun 2024 secara berkala;
- c. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.
- d. Untuk Memudahkan dalam monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja pada tahun 2024
- e. Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat
- f. Meningkatkan Kredibilitas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau.

D. Organisasi dan Struktur Organisasi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan pada Peraturan Bupati Berau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Berau.

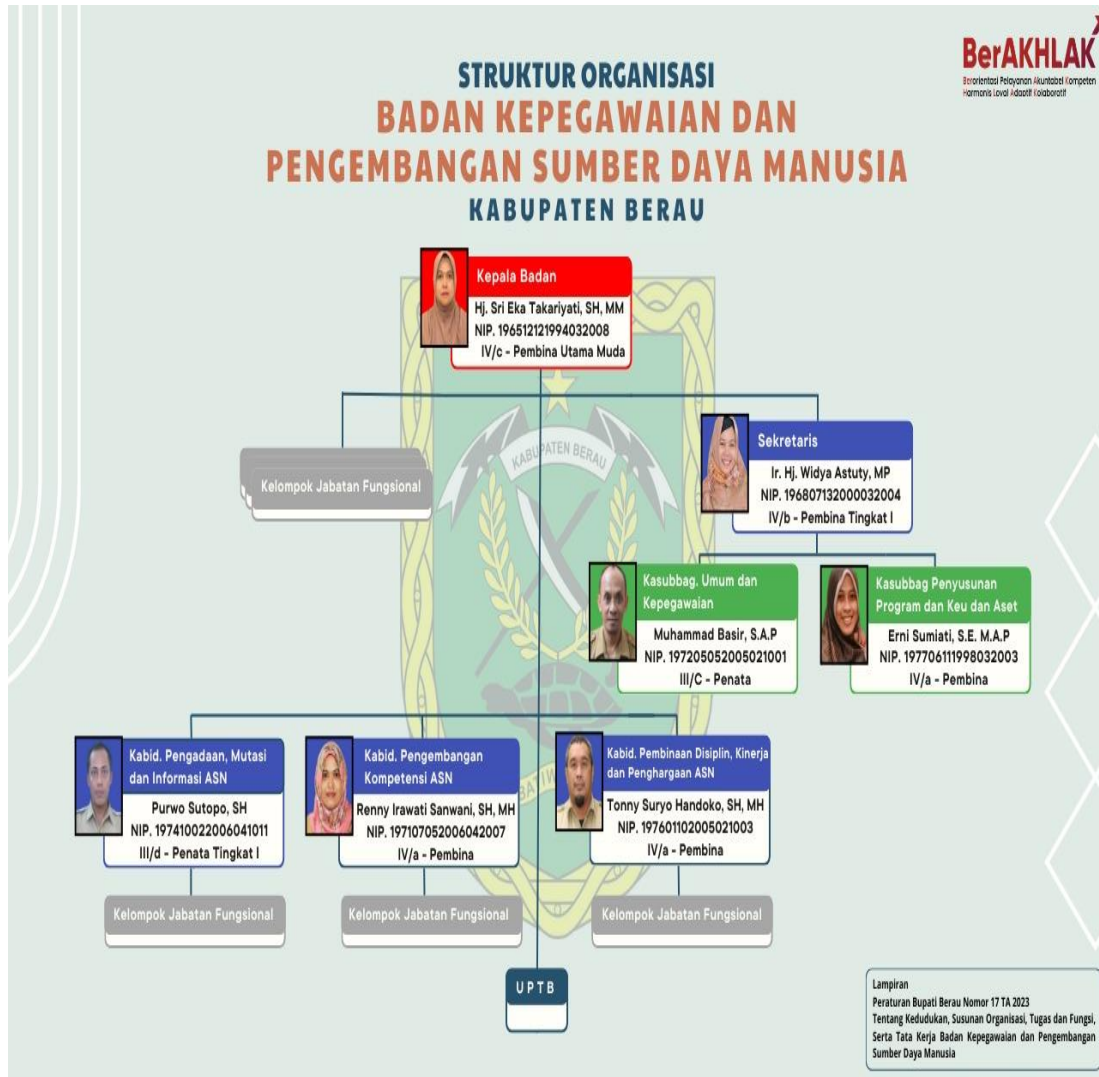
Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Dalam melaksanakan tugas, Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkungannya
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkungannya
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota sesuai Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil ;

Susunan Organisasi Badan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset
- c. Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi Aparatur Sipil Negara membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Penghargaan Aparatur Sipil Negara membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
- f. UPTB
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Tabel I
Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Berau
Tahun 2023



BAB II RENCANA AKSI

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026, terkait Misi ke IV (empat) yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel, dengan program prioritas pembangunan pada bidang Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih & Berkualitas Melalui SDM Yang Profesional Berbasis Digital Teknologi.

Program prioritas pembangunan daerah merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah, tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau 2021-2026 adalah :**“Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Berau yang Kompeten, Berdaya Saing, Profesional dan berintegritas tinggi”**, dengan sasaran strategis :

1. Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur
2. Meningkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
3. Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian

Tabel II.1

Tujuan dan Sasaran Renstra BKPSDM Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Berau yang Kompeten, Berdaya Saing, Profesional dan berintegritas tinggi	Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,39	0,49	0,59	0,69	0,79	0,89
			Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	78,59	82,63	86,69	90,74	94,79	98,84
		Meningkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	%	0,4	0,37	0,35	0,29	0,2	0,09
		Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian	Persentase data kepegawaian yang terupdate/terbarukan	%	90	90	90	90	90	90

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga dan instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja perangkat Daerah.

Tugas : Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

- Fungsi :
1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil
 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan
 4. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan

5. Pelaksanaan UPTB
6. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Tujuan : 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Berau yang Kompeten, berdaya saing, Profesional dan berintegritas tinggi

Tabel II.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
BKPSDM Kabupaten Berau
Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas kinerja SDM Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar/ijin belajar -----X 100 Jumlah ASN	Rekapitulasi jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar/ijin belajar	Bidang Pengembangan Kompetensi ASN
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural / fungsional	%	Jumlah ASN yang telah mengikuti Diklat + Jumlah ASN yang akan pensiun -----X 100 Jumlah Jabatan Struktural/Fungsional	Rekapitulasi Jumlah ASN yang telah mengikuti diklat	Bidang Pengembangan Kompetensi ASN
2	Meningkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	%	(Jumlah pelanggaran disiplin /kasus hukum tahun lalu- Jumlah pelanggaran disiplin /kasus hukum tahun ini) -----X 100 Jumlah pelanggaran disiplin/kasus tahun lalu	Rekapitulasi jumlah pelanggaran disiplin	Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Penghargaan ASN
3	Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian	Persentase data kepegawaian yang terupdate/terbarukan	%	Jumlah data ASN yang diupdate -----X 100 Jumlah ASN	Rekapitulasi Data kepegawaian yang terupdate	Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi ASN

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur

tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel II.3
Perjanjian Kinerja (PK)
BKPSDM Kabupaten Berau
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas kinerja SDM Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0,69
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural / fungsional	90,74
2	Meningkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	0,29
3	Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian	Persentase data kepegawaian yang terupdate/terbarukan	90

A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp	8.978.353.416,-
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	666.637.400,-
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	7.508.523.016,-
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	104.750.000,-
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	282.107.200,-
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	108.826.400,-
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	162.501.400,-
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	145.008.000,-

B.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp	3.871.972.600,-
8.	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Rp	679.998.000,-
9.	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Rp	799.999.000,-
10.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Rp	1.376.975.600,-
11.	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp	1.015.000.000,-
C.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp	5.823.429.000,-
12.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rp	5.823.429.000,-

D. Rencana Aksi

Rencana Aksi Tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024. Adapun Target Rencana Aksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini dan Tabel Rencana Aksi Tahun 2024 sebagaimana terlampir :

Tabel II.4
Target Rencana Aksi untuk
Pencapaian Sasaran Strategis
BKPSDM Kabupaten Berau
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan			
				I	II	III	IV
1	Meningkatnya kualitas kinerja SDM Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0,69				0,69
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural / fungsional	90,74	22,69	22,69	22,69	22,69
2	Meningkatkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	0,29				0,29

3	Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian	Persentase data kepegawaian yang terupdate/terbarukan	90	25	20	20	25
---	---	---	----	----	----	----	----

A. Program dan Kegiatan

Pada tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau melaksanakan Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dijabarkan dalam 3 (tiga) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) Sub Kegiatan terdiri dari :

- a. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
 1. **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Bimbingan Teknis Impelmentasi Peraturan Perundang-Undangan
 4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 5. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b. PROGRAM KEPEGAWAIAN

- 1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**
 - a) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - b) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - b) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - c) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - d) Pengelolaan Data Kepegawaian
- 2. Mutasi dan Promosi ASN**
 - a) Pengelolaan Mutasi ASN
 - b) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - c) Pengelolaan Promosi ASN
- 3. Pengembangan Kompetensi ASN**
 - a) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
 - b) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - c) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
- 4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**
 - a) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - b) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur
 - c) Pembinaan Disiplin ASN
 - d) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
 - e) Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
 - f) Evaluasi Disiplin ASN

c. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- 1. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**

- a) Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
- b) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan

B. Alokasi Anggaran

Anggaran merupakan rencana keuangan secara priode yang telah disusun berdasarkan program dan kegiatan yang telah disahkan. Alokasi Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024 dapat tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel II.5

**Alokasi Anggaran
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Berau
Tahun 2024**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	BELANJA	
1	BELANJA OPERASI	18.442.411.716,-
	Belanja Pegawai	6.408.293.016,-
	Belanja Barang dan Jasa	12.034.118.700,-
2	BELANJA MODAL	231.343.300,-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139.548.300,-
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	91.795.000,-
	Jumlah Belanja	18.673.755.016,-

BAB III

PENUTUP

Rencana Aksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau tahun 2024 disusun sesuai dengan Tujuan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2021-2026, yang berisi tentang sasaran strategis, program dan kegiatan/sub kegiatan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan bidang kepegawaian. Penetapan indikator-indikator kinerja dari program dan kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat diukur capaian kinerjanya sekaligus memudahkan untuk mengadakan evaluasi keberhasilan dan kegagalan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai hasil yang optimal pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau, terletak pada kemampuan menciptakan sinergitas, keterpaduan, sinkronisasi dan koordinasi dengan bidang-bidang yang ada melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antara instansi terkait. Komitmen dan dukungan dari semua pihak dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan bidang kepegawaian sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau.

Demikian penyusunan Rencana Aksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Redeb, Februari 2024

Kepala

Hj. SRI EKA TAKARIYATI, SH., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19651212 199403 2 008

RENCANA AKSI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN BERAU TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis					Program dan Kegiatan/sub Kegiatan						Anggaran Program dan Kegiatan	Target		Penanggung jawab		
	Uraian	Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Target		Uraian	Indikator Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target		Triwulan (Tw)	Target			
				Triwulan (Tw)	Target						Triwulan (Tw)					Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan baik	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja								
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Tw 1	3	Rp 40,468,000	Tw 1	Rp 16,187,200	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset	
											Tw 2	3		Tw 2	Rp 12,140,400		
											Tw 3	3		Tw 3	Rp 8,093,600		
											Tw 4	3		Tw 4	Rp 4,046,800		
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		Tw 1	3	Rp 25,000,000	Tw 1	Rp 10,000,000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset	
											Tw 2	0		Tw 2	Rp 7,500,000		
											Tw 3	3		Tw 3	Rp 5,000,000		
											Tw 4	4		Tw 4	Rp 2,500,000		
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Tw 1	3	Rp 601,169,400	Tw 1	Rp 240,467,760	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset	
											Tw 2	3		Tw 2	Rp 180,350,820		
											Tw 3	3		Tw 3	Rp 120,233,880		
											Tw 4	3		Tw 4	Rp 60,116,940		
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Keuangan Perangkat Daerah							
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Asn	Orang/Bulan		Tw 1	200	Rp 5,792,731,016	Tw 1	Rp 2,317,092,406	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
												Tw 2	200		Tw 2	Rp 1,737,819,305	
											Tw 3	150	Tw 3		Rp 1,158,546,203		
											Tw 4	150	Tw 4		Rp 579,273,102		
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		Tw 1	3	Rp 1,531,200,000	Tw 1	Rp 612,480,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
											Tw 2	3		Tw 2	Rp 459,360,000		
											Tw 3	3		Tw 3	Rp 306,240,000		
											Tw 4	3		Tw 4	Rp 153,120,000		
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		Tw 1	3	Rp 184,592,000	Tw 1	Rp 73,836,800	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
											Tw 2	3		Tw 2	Rp 55,377,600		
											Tw 3	3		Tw 3	Rp 36,918,400		
											Tw 4	3		Tw 4	Rp 18,459,200		

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah pemenuhan kebutuhan sesuai informasi dan jumlah data kepegawaian yang diupdate										
1	Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian	Persentase data kepegawaian yang terupdate/terbarukan	Orang	Tw 1	2000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	Tw 1	0	Rp	75,000,000	Tw 1	Rp	30,000,000	Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi ASN		
				Tw 2	1500				Tw 2	0			Tw 2	Rp	22,500,000			
				Tw 3	1000				Tw 3	0			Tw 3	Rp	15,000,000			
				Tw 4	500				Tw 4	1			Tw 4	Rp	7,500,000			
						Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Orang	Tw 1	0	Rp	400,000,000	Tw 1	Rp	160,000,000	Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi ASN		
									Tw 2	100			Tw 2	500	Tw 2		Rp	120,000,000
									Tw 3	0			Tw 3	0	Tw 3		Rp	80,000,000
									Tw 4	70			Tw 4	0	Tw 4		Rp	40,000,000
						Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	Tw 1	1250	Rp	74,998,000	Tw 1	Rp	29,999,200	Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi ASN		
									Tw 2	1500			Tw 2	Rp	22,499,400			
									Tw 3	1250			Tw 3	Rp	14,999,600			
									Tw 4	1500			Tw 4	Rp	7,499,800			
						Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	Tw 1	0	Rp	70,000,000	Tw 1	Rp	28,000,000	Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Penghargaan ASN		
									Tw 2	0			Tw 2	Rp	21,000,000			
									Tw 3	50			Tw 3	Rp	14,000,000			
									Tw 4	50			Tw 4	Rp	7,000,000			
						Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang terlayani dalam pengurusan mutasi dan kepangkatan serta kesesuaian jabatan dengan	Dokumen	Tw 1	100	Rp	199,999,000	Tw 1	Rp	79,999,600	Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi ASN		
									Tw 2	150			Tw 2	Rp	59,999,700			
									Tw 3	0			Tw 3	Rp	39,999,800			
									Tw 4	0			Tw 4	Rp	19,999,900			
						Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	Tw 1	250	Rp	150,000,000	Tw 1	Rp	60,000,000	Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi ASN		
									Tw 2	250			Tw 2	Rp	45,000,000			
									Tw 3	250			Tw 3	Rp	30,000,000			
									Tw 4	250			Tw 4	Rp	15,000,000			
						Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	Tw 1	0	Rp	450,000,000	Tw 1	Rp	180,000,000	Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi ASN		
									Tw 2	3			Tw 2	Rp	135,000,000			
									Tw 3	0			Tw 3	Rp	90,000,000			
									Tw 4	0			Tw 4	Rp	45,000,000			

		Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	SK	Tw 1	6			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	Tw 1	3	Rp	80,000,000	Tw 1	Rp	32,000,000	Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Penghargaan ASN	
				Tw 2	6						Tw 2	3			Tw 2	Rp	24,000,000		
				Tw 3	6						Tw 3	3			Tw 3	Rp	16,000,000		
				Tw 4	5						Tw 4	6			Tw 4	Rp	8,000,000		
								Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani	Dokumen	Tw 1	3	Rp	55,000,000	Tw 1	Rp	22,000,000	Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Penghargaan ASN	
											Tw 2	3			Tw 2	Rp	16,500,000		
											Tw 3	6			Tw 3	Rp	11,000,000		
											Tw 4	5			Tw 4	Rp	-		
								Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	Tw 1	5	Rp	60,000,000	Tw 1	Rp	24,000,000	Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Penghargaan ASN	
											Tw 2	0			Tw 2	Rp	18,000,000		
											Tw 3	0			Tw 3	Rp	12,000,000		
											Tw 4	47			Tw 4	Rp	-		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																			
								Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN (JPT, JA yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan dan CPNS mengikuti Prajabatan)										
	Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Orang	Tw 1	233			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	Tw 1	500	Rp	999,989,000	Tw 1	Rp	399,995,600	Bidang Pengembangan Kompetensi ASN	
				Tw 2	280						Tw 2	0			Tw 2	Rp	299,996,700		
				Tw 3	210						Tw 3	0			Tw 3	Rp	199,997,800		
				Tw 4	210						Tw 4	0			Tw 4	Rp	99,998,900		
								Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan SDM	Orang	Tw 1	233	Rp	4,823,440,000	Tw 1	Rp	1,929,376,000	Bidang Pengembangan Kompetensi ASN	
											Tw 2	310			Tw 2	Rp	1,447,032,000		
											Tw 3	225			Tw 3	Rp	964,688,000		
											Tw 4	225			Tw 4	Rp	482,344,000		

Ket :
 * Pada kolom (14) diisi dengan KAS ANGGARAN pada DPA

Tanjung Redeb, 17 Februari 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BERAU,

HJ. SRI EKA TAKARIYATI SH., MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19651212 199403 2 008